

KUALITAS DEMOKRASI UNTUK LAMPUNG BERKOMPETENSI

A DEMOCRACY QUALITY FOR THE COMPETENT LAMPUNG

Ridwan Saifuddin

Balitbangda Provinsi Lampung
E-mail:bumikitasatu@yahoo.com

Dikirim 16 Januari 2017 Direvisi 15 Februari 2017 Disetujui 16 Maret 2017

ABSTRAK

Demokratisasi yang bergerak dinamis di Indonesia telah menimbulkan berbagai akibat pada setiap level wilayah. Pada beberapa wilayah, walikota atau gubernur yang dipilih dalam proses pemilihan langsung adalah pemimpin berbakat yang mempunyai kinerja kepemimpinan yang sangkil pada pelayanan masyarakat. Pada saat yang sama, pada beberapa wilayah pemilihan kepala daerah tidak mengubah secara signifikan dengan pemimpin-pemimpin baru mereka. Harapan untuk memuaskan Lampung dengan kompetensi harus didukung oleh Pemerintah yang kompeten di dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Pemerintahan yang kompeten diharapkan diperoleh dari proses demokrasi yang berkualitas. Melalui telaah literatur dapatlah diidentifikasi setidaknya empat faktor yang mempengaruhi kualitas seperti yang dihasilkan oleh proses demokrasi pada pemilihan walikota dan gubernur secara langsung seperti kualitas preferensi pemilih, kualitas persepsi para politisiakan masalah dan aspirasi masyarakat yang ia wakili, minat birokrasi (politisi), dan kompetensi birokrat.

Kata kunci: demokrasi, pemilihan walikota, pemilihan gubernur, pelayanan umum, kompetensi

ABSTRACT

Democratization moved dynamically in Indonesia had initiated various impacts on each region level. In some regions, major or governor elected in direct election process was born leader having effective leadership performance on public services. At the same time, in some regions the election didn't change significantly with their new leaders. The hope to satisfy Lampung with competency should be supported by government competence in resolving citizen problems. A competent government was expected to result from qualified democracy process. Through literature study, it would identify at least four factors which affected quality as resulted by the democracy process of the major or governor direct election which were voter preference quality, politician perception quality on problems and citizen aspiration he or she represented, bureaucracy (political) interest, and bureaucrat competency.

Keyword : *democracy, major election, governor election, public service, competency.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencanangan program Lampung Kompeten oleh Gubernur Lampung pada 12 Oktober 2016 lalu menjadi tonggak penting arah pembangunan provinsi yang memiliki visi pembangunan jangka menengah 2015-2019: “Lampung Maju dan Sejahtera.” Gagasan program tersebut berangkat dari tuntutan global yang menyaratkan kompetensi pada berbagai bidang untuk bisa bersaing dalam era yang semakin terbuka.

Keterbukaan ekonomi membawa konsekuensi meningkatnya persaingan dalam pasar tenaga kerja maupun pasar produk-produk industri. Persaingan produk industri selalu terkait dengan aspek kualitas, harga, juga ketersediaan pasokan, yang menjadi hilir dari proses produksi dengan pelibatan faktor-faktor produksi yang juga menuntut spesifikasi tertentu. Dalam pasar tenaga kerja persaingan menuntut syarat kompetensi yang disesuaikan dengan struktur tenaga kerja dalam industri. Kemajuan teknologi produksi dan teknologi pendukungnya juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya spesifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja dalam satu industri.

Menjadi relevan jika kemudian Pemerintah Provinsi Lampung mencanangkan program Lampung Kompeten. Program tersebut ditujukan dalam rangka melakukan pembinaan dan memfasilitasi sertifikasi keahlian yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang berwenang dalam sertifikasi profesi. Tujuannya tentu agar tenaga kerja dari daerah ini memiliki pengakuan keahlian, dan dengan demikian memiliki standar kualifikasi untuk bersaing di dunia kerja baik skala nasional maupun global. Selain Lampung, provinsi lain yang memiliki program serupa diantaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali. Bidang sertifikasi yang telah dilakukan

Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain bidang pariwisata, peternakan, konstruksi, perkebunan, perikanan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perbenihan. Kegiatan yang dilakukan, antara lain, membangun komitmen dengan pihak terkait, revitalisasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi.

Provinsi Lampung yang secara geografis berada pada posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus penghubung dengan Pulau Jawa, menjadikan daerah ini menarik untuk investasi. Kegiatan ekonomi yang terus meningkat harus dibarengi kesiapan warga di daerah untuk mempersiapkan diri, meningkatkan kompetensi keahlian, sehingga tidak menjadi penonton atau korban dari aktivitas perekonomian tersebut. Lapangan kerja di daerah yang bertumbuh seiring tumbuhnya investasi harus mampu dijawab dengan kesiapan tenaga kerja lokal dengan kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan industri, bukan justru dimanfaatkan oleh tenaga kerja dari luar.

Tantangan bagi pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator juga semakin tinggi. Meningkatkan kompetensi warga harus berbarengan dengan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah (Aparatur Sipil Negara—ASN) sebagai penggerak roda birokrasi. Kompetensi ASN ini menjadi kebutuhan mendesak dengan semakin tingginya tuntutan warga terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Kompetensi ASN yang tinggi diharapkan dapat melahirkan kinerja birokrasi yang prima, dan pada gilirannya akan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Tuntutan akan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi, serta pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut kesiapan aparatur untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan tersebut. Pendekatan dalam pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung

antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, loka karya, seminar, kursus yang berbasis kebutuhan aktual, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Ini menjadi salah satu prasyarat untuk menjadikan daerah yang lebih maju dimana peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan seiring pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang berjalan secara prima khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

Kinerja birokrasi, selain dipengaruhi kualifikasi dan kompetensi ASN, juga secara signifikan ditentukan komitmen kepemimpinannya. Disebut kepemimpinan, karena meski kekuasaan di daerah terbagi antara eksekutif dan DPRD, dimana kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif, acap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan lainnya. Komitmen elite politik di daerah menjadi faktor krusial dalam upaya melahirkan birokrasi yang berkompeten dan menghadirkan pelayanan publik yang prima.

Proses demokrasi yang terbuka dalam pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah (Pilkada)—dimana rakyat berdaulat penuh menentukan wakil-wakilnya di DPRD dan pemimpin daerah—ternyata juga tidak otomatis melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif. Kedewasaan dalam berdemokrasi yang ditandai suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada, juga tidak serta-merta bisa menghadirkan pelayanan publik yang prima.

1.2. Tujuan Penulisan

Tulisan ini akan mendeskripsikan berdasarkan studi literatur tentang faktor yang menentukan kualitas demokrasi khususnya dalam proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dalam kaitan upaya melahirkan pemerintahan yang kompeten untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan

pelayanan publik yang berkualitas. Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi dalam pemilihan umum, terutama dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan harapan rakyat sebagai konstituen pemilu.

II. PEMBAHASAN

2.1. Indikator Demokrasi

David Beetham menerjemahkan demokrasi kedalam dua faktor, yaitu faktor “kedaulatan rakyat” (*rule of the people*) yang secara spesifik diartikan sebagai kontrol populer (*popular control*), dan faktor kesetaraan politik (*political equality*). Kontrol populer diterjemahkan sebagai hak rakyat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik. Sedangkan kesetaraan politik diartikan perlakuan terhadap masyarakat yang didasari pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan (Tjhin, 2005).

Franz Magnis Suseno (1988) menyatakan lima ciri utama negara demokrasi, yaitu tegaknya hukum, pemerintah berada dibawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Menurut Miriam Budiardjo (2006) di kebanyakan negara, pemilihan umum dianggap sebagai tolok ukur demokrasi. Salah satu manivestasi demokrasi adalah dilaksanakannya pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin dan memilih wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia

dinilai sebagai refleksi dari partisipasi dan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Affan Gaffar dalam “Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi” (2004: 7-9) menjelaskan indikator suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar warga.

Dalam negara demokrasi, setiap pemangku jabatan yang dipilih oleh rakyat berkewajiban mempertanggungjawabkan keputusan dan kebijakan yang diambil. Bahkan, pejabat yang dipilih rakyat dituntut menjaga ucapan atau kata-katanya, juga perilaku dalam kehidupan yang pernah dan sedang dijalannya. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menyangkut pribadinya, tetapi juga keluarganya, anak dan isterinya, juga sanak-keluarganya terutama yang berhubungan dengan jabatan publik yang diembannya.

Dalam negara demokrasi, harus ada rotasi kekuasaan yang dilakukan secara teratur dan damai. Tidak boleh hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Rotasi kekuasaan, mensyaratkan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk suatu jabatan politik yang dipilih rakyat, punya peluang yang sama dalam kompetisi terbuka untuk mengisi jabatan politik tersebut.

Pemilu dilaksanakan secara teratur dalam suatu negara demokrasi, sebagai wahana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, dan bebas menggunakannya sesuai hati nurani. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti aktivitas dalam proses pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.

Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Demokrasi pada prinsipnya adalah wahana kedaulatan rakyat dalam mengekspresikan perannya politiknya secara aktif dan partisipatif.

Meski demikian pemilu bukan satu-satunya instrumen perwujudan kedaulatan rakyat. Prinsip partisipasi politik rakyat tidak berhenti sebatas pemilihan dalam bilik-bilik suara pada saat pemilu atau pilkada. Pemilu dan pilkada adalah pintu masuk untuk peran masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan selanjutnya. Dalam proses pelibatan masyarakat tersebut, setiap individu harus dipandang setara. Setiap individu diperlakukan sebagai warganegara (*inclusion*) tanpa melihat latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain.

2.2. Proses Demokrasi dan Hasilnya

Publik mungkin akan kecewa ketika berharap kinerja pemerintah daerah akan berubah selesai sukses pelaksanaan pemilu atau pilkada yang demokratis. Meski, di beberapa daerah, Pilkada telah nyata berhasil menghadirkan pemimpin dan pemerintah daerah dengan kinerja prima yang mampu membahagiakan warganya.

Tahap kedua pilkada serentak telah berlangsung pada 15 Februari 2017 lalu. Tercatat 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota relatif sukses menggelar pemilihan kepala daerah dalam waktu yang sama. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada 2015—dan akan berlanjut tahap-tahap berikutnya—sampai 2027 dimana rencananya pilkada dilaksanakan pada waktu yang sama untuk semua daerah secara nasional.

Banyak pihak menilai suksesnya pelaksanaan pilkada serentak mengindikasikan demokrasi yang semakin dewasa. Dari aspek kualitas penyelenggaraan pemilihan dan pengamanan secara umum relatif membaik dibanding

pemilu sebelumnya, meski tidak berarti bebas pelanggaran, seperti dugaan politik uang, problem akurasi daftar pemilih, konflik antar-tim kampanye dan lain sebagainya.

Namun pemilihan langsung yang demokratis itu tidak serta-merta menghasilkan pemerintah yang sesuai harapan warga. Setidaknya empat faktor potensial penghambat satu pemilihan yang demokratis melahirkan pemerintah yang responsif (Fung, 2004). *Pertama*, mayoritas pemilih tidak memiliki preferensi yang jelas mengenai kebijakan publik apa yang paling dapat memajukan kepentingan mereka. Atau, pada saat yang sama, preferensi pemilih tidak stabil. Mereka akan dengan mudah merubah pilihan lantaran informasi, argumentasi, atau pandangan baru yang berbeda. Politik uang juga mendapatkan ruang disini. Ketika preferensi warga yang tidak stabil ini berkembang, maka konsekuensi berikutnya adalah pilihan politik dan kebijakan bersandar pada dasar yang juga tidak stabil.

Kedua, mekanisme pemilu demokratis tidak menjamin mampu melahirkan pemahaman yang baik dari kalangan politisi dan partai mengenai esensi suara (pesan) pemilih yang ditiptkan kepada mereka. Harapan warga bahwa pelibatan mereka dalam politik dan pemerintah tidak hanya pada saat dilaksanakan pemilihan umum, melainkan juga dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik. Mekanisme pemilu dengan demikian hanyalah relasi awal antara elite dan warga. Dalam proses berikutnya, harapan warga untuk didengar suaranya dan terlibat dalam penyusunan kebijakan publik tidak menjadi berkurang.

Mekanisme pelibatan publik dalam penyusunan kebijakan ini menjadi tugas pemimpin dan pemerintah hasil pemilu demokratis, sekaligus menjadi indikator akuntabilitas dan resposibilitas elite pemerintahan. Pelibatan publik bukan sekadar memenuhi prosedur formal semata, seperti penyusunan program pembangunan dalam Musrenbang, melainkan benar-benar dalam rangka mendengar pendapat dan suara rakyat

dalam proses yang setara dan profesional dalam menyelesaikan permasalahan. Menempatkan partisipasi publik secara setara dan profesional ini tentu juga memerlukan kapasitas publik yang baik, yang tidak serta-merta dimiliki semua warga.

Ketiga, selain potensi “kesalahpahaman” antara pemilih dengan elite politik, warga juga menghadapi mesin birokrasi dengan struktur (dan budaya) administrasinya sendiri. Dengan demikian sulit memastikan bahwa pemilihan umum yang demokratis kemudian bisa menjamin kepentingan elite politik dan aparatur birokrasi akan sejalan dengan kepentingan mayoritas warganya dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik.

Dengan demikian, dua problem utama dalam mewujudkan akutabilitas pemerintahan pasca pemilu demokratis adalah dalam kaitan hubungan patronase politik dan pendelegasian administratif dalam birokrasi. Birokrasi melakukan banyak pekerjaan pemerintah. Bertambahnya struktur, kompleksitas, dan rentang kendali di dalam birokrasi berpotensi menimbulkan masalah dimana para pejabat pemangkunya dimungkinkan membuat kebijakan dengan cara mengabaikan preferensi publik (Dunn, 1999).

Keempat, hambatan untuk pemerintahan yang responsif adalah kapasitas dan kompetensi jajaran birokrasi itu sendiri. Ketika mekanisme pemilu sudah representatif dan akuntabel—dan memungkinkan pemilih mengendalikan agen-agen politik mereka—pemerintah (esekutif) tidak serta-merta mempunyai kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk memproduksi kebijakan serta pelayanan publik yang berkualitas.

Kompetensi birokrasi dalam hal ini diukur seberapa efektif kemampuannya menyelesaikan masalah-masalah publik. Orientasi pembuatan kebijakan pemerintah sering tidak untuk menyelesaikan permasalahan warganya, melainkan sekadar meneruskan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya atau untuk memenuhi kepentingan tertentu.

Permasalahan warga yang muncul condong didekati dengan perspektif kekuasaan. Sementara solusi untuk banyak masalah sering tidak cukup hanya dengan legitimasi elite politik, melainkan memerlukan pengambilan keputusan bersama antara pemerintah dengan warga pemangku kepentingan.

Secara umum, masalah yang melibatkan aktor-aktor yang saling tergantung yang mempunyai beragam kepentingan, nilai, dan pengalaman, seperti dalam banyak jenis pengelolaan sumber daya alam dan masalah pembangunan ekonomi, sering kali tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme dan metode tradisional atas-bawah negara-sentris (Booher dan Innes 2002).

Dari empat faktor diatas, benang merah lahirnya pemerintahan yang resposif memerlukan adanya rantai hubungan yang kuat dan berkesinambungan antara “tuan” (warga pemilih) dan “agen” (politisi dan birokrat) dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya. Dalam rentang waktu tersebut terjadi proses seleksi, interaksi-partisipasi, serta evaluasi yang dinamis dan tidak terputus, di mana tidak ada salah satu aktor yang terpinggirkan. Pelibatan aktif warga tersebut sekaligus dapat membantu mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintahan, juga menjadi sumber daya, energi, dan ide dari para pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah publik dan melahirkan kebijakan publik yang efektif dan solutif.

2.3. Lampung Kompeten

Pemerintah Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkesinambungan melalui program-program pembinaan pegawai. Penguatan kompetensi ASN tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Lampung kompeten dapat menjadi *back bone* terwujudnya reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung. Terutama dari sisi peningkatan kompetensi ASN dalam

rangka meningkatnya kualitas pelayanan publik,” kata Sekda Provinsi Lampung (<http://inilampung.com/pemprov-lampung-siapkan-sdm-untuk-berkompetensi-di-pasar-global/>).

Program Lampung Kompeten yang diarahkan untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan sertifikasi profesi sesuai bidang masing-masing tentu harus diimbangi dengan kompetensi ASN sebagai penggerak roda birokrasi. Kompetensi ASN dalam menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik harus semakin berkualitas dengan program peningkatan kompetensi tersebut. Upaya meningkatkan kapasitas ASN ini termuat dalam satu frame Lampung Kompeten.

Tuntutan kompetensi ASN semakin tinggi. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima semakin mendesak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat juga menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran birokrasi untuk bisa meresponsnya secara tepat. Untuk itu pendekatan dalam pengembangan kompetensi ASN oleh Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan melalui kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, loka karya, seminar, kursus, dan lainnya yang berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan.

Masyarakat yang kompeten dengan aparatur birokrasi di daerah yang juga kompeten, dimana masing-masing mampu menjalankan fungsi dan pekerjaannya dengan performa yang baik dalam lingkungan yang kondusif, maka akan menjadikan Provinsi Lampung menjadi daerah yang unggul dengan masyarakat yang mampu berkompetisi secara terbuka pada berbagai sektor. Itu semua memerlukan sinergi dari semua pihak dalam lingkungan sosial-politik yang baik. Kondisi tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen para pemimpin dan elite pemerintahan.

Pemimpin politik lahir dari proses seleksi politik. Sebagai negara demokrasi, partai politik menjadi lokus pertama dan utama dalam proses kaderisasi dan seleksi calon-calon pemimpin politik. Maka, kualitas kaderisasi dan seleksi yang terjadi di dalam partai politik itulah yang menjadi hulu dari lahirnya kualitas pemimpin dan elite politik. Dari sanalah selanjutnya kompetisi yang melibatkan masyarakat lebih luas dilakukan dalam ajang pemilihan umum. Ajang pemilu menjadi wahana mengekspresikan kedaulatan rakyat. Disitulah, rakyat bebas memilih kepada siapa menyalurkan aspirasi dengan preferensi yang beraneka-ragam. Kualitas hasil pemilu berbanding lurus dengan kualitas preferensi rakyat yang melatari pilihan politiknya.

Berbagai faktor tersebut menjadi serangkaian mata rantai dalam sistem demokrasi, baik pada tingkat nasional maupun daerah, yang selanjutnya akan menentukan bagaimana performa kinerja pemerintahan dan kondisi kemasyarakatan.

III. KESIMPULAN

Terdapat empat faktor yang memengaruhi kualitas hasil dari proses demokrasi khususnya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu kualitas preferensi pemilih, kualitas pemahaman politisi terhadap aspirasi dan persoalan warga yang diwakilinya, kepentingan (politisasi) birokrasi, dan kompetensi birokrat.

Membangun Lampung Kompeten memerlukan peran dan partisipasi aktif semua unsur pemerintahan daerah dan masyarakat secara sinergis, sehingga proses demokrasi mulai dari pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, sampai dengan pelibatan/partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berkualitas. Kompetensi masing-masing unsur

pemangku kepentingan dalam setiap proses demokrasi tersebut diharapkan akan melahirkan pemerintahan yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik, pembangunan yang kompeten dalam menyelesaikan permasalahan rakyat dan daerah, serta masyarakat yang kompeten dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Affan Gaffar, 2004, *“Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi.”* Jakarta.

David Beetham, 2013, *“The Legitimation of Power 2nd,”* Pilgrave Macmillan.

Franz Magnis Suseno, 1988, *“Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,”* Gramedia, Jakarta.

Maswadi Rauf, dkk. 2013, *“Demokrasi Indonesia; Ledakan Tuntutan Publik vs Inersia Politik,”* Indeks Demokrasi Indonesia.

Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin. 2015. *“Handbook of Public Policy,”* (terjemahan oleh Imam Baehaqie, penyunting Rizal). Penerbit Nusa Media, Bandung.

Miriam Budiardjo, 2006, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik,”* Penerbit Gramedia, Jakarta.

Website:

<https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/gubernur-berharap-sdm-lampung-berkompeten/>

<http://inilampung.com/pemprov-lampung-siapkan-sdm-untuk-berkompetensi-di-pasar-global/>

<http://lampung.antaranews.com/berita/293683/gubernur-berharap-sdm-lampung-berkompeten>

<http://suarapedia.com/id-815-post-sdm-di-lampung-harus-miliki-kemampuan-dan-bersertifikasi.html>